

ABSTRAK

Otonomi Daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab menuntut setiap daerah agar lebih otonom dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Melalui kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan untuk menumbuhkan sektor riil dengan melaksanakan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD dan kemandirian daerah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal ekspansif serta mengetahui besarnya kemandirian keuangan daerah. Dari sejumlah pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk ternyata belum mampu meningkatkan PAD secara maksimal, karena hanya sektor ekonomi tertentu yang berkembang dan dapat memberikan kontribusi besar bagi penerimaan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui indikator rasio kinerja keuangan daerah seperti desentralisasi fiskal, posisi fiskal dan rasio kemandirian daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Nganjuk yang diukur melalui derajat desentralisasi fiskal adalah masih sangat rendah. Saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti halnya Kabupaten Nganjuk dalam membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan masih belum dapat lepas dari peran pemerintah pusat.